

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN  
PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI PARKIR  
DI KOTA SURABAYA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Ilmu Ekonomi**



Oleh :

**EDITH APRILANA**  
**0611010019 / FE / IE**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
JAWA TIMUR  
2010**

**SKRIPSI**

**BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN  
PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI PARKIR  
DI KOTA SURABAYA**

**Disusun oleh :**

**Edith Aprilana  
0611010039/ FE/ IE**

**Telah Dipertahankan Dihadapan Dan Diterima Oleh  
Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Pada Tanggal 03 September 2010**

**Pembimbing Utama :**

**Dr. Syamsul Huda, SE, MT**

**Tim Penguji :  
Ketua**

**Dr. Syamsul Huda, SE, MT**

**Sekretaris**

**Drs. Ec. Wiwin Priana, MT**

**Anggota**

**Drs. Ec. Hj. Titiek Nur H**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”  
Jawa Timur**

**Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM  
NIP. 030 202 389**



## **DAFTAR ISI**

### **LEMBAR PENGESAHAN**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	7

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan teori.....	11
2.2.1 Pengertian Pajak.....	11
2.2.1.1 Jenis-jenis Pajak .....	13
2.2.1.2 Fungsi Pajak .....	14
2.2.1.3 Tarif Pajak .....	15
2.2.1.4 Prinsip Pajak .....	16
2.2.1.5 Teori Pemungutan Pajak .....	17
2.2.2 Pajak Daerah.....	18

2.2.2.1	Pengertian Daerah .....	18
2.2.2.1.1	Pembangunan Daerah.....	19
2.2.2.2	Pengertian Pajak Daerah .....	20
2.2.2.3	Ruang Lingkup Pajak Daerah .....	22
2.2.2.4	Sumber-sumber Keuangan Daerah di kota Surabaya .....	22
2.2.2.5	Sumber-sumber Pendapatan Daerah .....	23
2.2.3	Pajak Hiburan Sebagai Komponen Pajak Daerah .....	24
2.2.3.1	Pengertian Pajak Hiburan .....	24
2.2.3.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan .....	25
2.2.4	Retribusi Parkir .....	25
2.2.4.1	Definisi Retribusi Parkir .....	25
2.2.4.2	Penggolongan Retribusi Parkir .....	27
2.2.4.3	Hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi parkir di kota Surabaya .....	28
2.2.5	Pendapatan Perkapita .....	29
2.2.5.1	Pengertian Pendapatan Perkapita .....	29
2.2.5.2	Fungsi Pendapatan Perkapita .....	32
2.2.6	Tingkat Inflasi .....	33
2.2.6.1	Definisi Inflasi .....	33
2.2.6.2	Penggolongan Inflasi .....	34
2.2.6.3	Cara Mengatasi Inflasi .....	37
2.2.7	Jumlah Tempat Hiburan .....	38
2.2.7.1	Pengertian Tempat Hiburan .....	38

2.2.7.2 Subyek Pajak Hiburan .....	39
2.2.7.3 Obyek Pajak Hiburan .....	39
2.3 Kerangka Pikir .....	41
2.4 Hipotesis .....	45

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel.....	46
3.2 Teknik Penentuan Sampel.....	47
3.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	48
3.4 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis .....	48
3.4.1 Teknik Analisis .....	48
3.4.2 Uji Hipotesis .....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	55
4.1.1 Kondisi Geografis.....	55
4.1.2 Kependudukan.....	56
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir .....	57
4.2.2 Perkembangan Pendapatan Perkapita.....	58
4.2.3 Perkembangan Inflasi.....	
4.2.4 Perkembangan Tempat Hiburan.....	60

4.3	Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator).....	61
4.3.1	Analisis Dan Pengujian Hipotesis.....	65
4.3.2	Uji Hipotesis Secara Parsial.....	67
4.3.3	Pembahasan.....	68

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir .....	44
Gambar 2 Kriteria Uji F .....	51
Gambar 3 Kriteria Uji t .....	52
Gambar 4 Daerah Keputusan Uji Durbin Watson .....	53
Gambar 5 Kurva Statistik Durbin Watson.....	63



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Hiburan Dan Retribusi Parkir Kota Surabaya.....	58
Tabel 2 Perkembangan Pendapatan Perkapita Kota Surabaya.....	59
Tabel 3 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Surabaya.....	60
Tabel 4 Perkembangan Tempat Hiburan Kota Surabaya.....	61
Tabel 5 Tes Autokorelasi .....	63
Tabel 6 Tes Multikolinieritas .....	64
Tabel 7 Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman .....	64
Tabel 8 Analisis Varian (Anova) .....	67
Tabel 9 Hasil Analisis Variabel Pendapatan Perkapita ( $X_1$ ), Inflasi ( $X_2$ ), dan Jumlah Tempat Hiburan ( $X_3$ ), terhadap Penerimaan Pajak Hiburan ( $Y_1$ ) dan Retribusi Parkir ( $Y_2$ ) kota Surabaya .....	68
Tabel 10 Hasil Koefisien Variabel Independent .....	68

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Data Input

Lampiran 2 Analisa Regresi Linier Berganda dengan Progra SPSS 13.0

Lampiran 3 Tabel Uji F

Lampiran 4 Tabel Uji t

Lampiran 5 Tabel Durbin Watson

# **BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN RETRIBUSI PARKIR DI KOTA SURABAYA**

**Oleh :  
EDITH APRILANA**

## **Abstraksi**

Surabaya sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi masyarakat yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak, yaitu Pajak Hiburan. Salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan kota Surabaya diusahakan bersumber dari pajak hiburan dan retribusi parkir yang perlu terus ditingkatkan.

Adapun tujuan penelitian Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Inflasi dan Jumlah Tempat Hiburan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya baik secara simultan maupun parsial. Untuk mengetahui manakah dari ketiga variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya.

Setelah dilakukan uji statistik untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara variabel bebas Pendapatan Perkapita ( $X_1$ ), Inflasi ( $X_2$ ), dan Jumlah Tempat Hiburan ( $X_3$ ), terhadap variabel terikatnya Penerimaan Pajak Hiburan kota Surabaya ( $Y_1$ ) dan Retribusi Parkir kota Surabaya ( $Y_2$ ) diperoleh  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Penerimaan Pajak Hiburan kota Surabaya ( $Y_1$ ) dan Retribusi Parkir kota Surabaya ( $Y_2$ ).

Variabel yang berpengaruh paling dominan diantara tiga variabel bebas terhadap Penerimaan Pajak Hiburan kota Surabaya dan Retribusi Parkir kota Surabaya : Dapat diketahui dengan melihat koefisien determinasi parsial yang paling besar, dimana dalam perhitungan ditunjukkan oleh variabel Pendapatan Perkapita dengan koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ) sebesar 0,872 atau sebesar 87,2 % untuk Penerimaan Pajak Hiburan kota Surabaya dan 0,556 atau sebesar 55,6 % Retribusi Parkir kota Surabaya.

**Kata Kunci :** Penerimaan Pajak Hiburan ( $Y_1$ ), Retribusi Parkir ( $Y_2$ ), Pendapatan Perkapita ( $X_1$ ), Tingkat Inflasi ( $X_2$ ), Jumlah Tempat Hiburan ( $X_3$ )

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang, pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur, Dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan ber kedaulatan rakyat dalam suatu perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Ini berarti bahwa pembangunan itu berdasarkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara mengejar kemajuan lahiriah dan batiniah. Jadi Pembangunan Nasional dilaksanakan merata di seluruh tanah air dan tidak untuk satu golongan atau sebagian masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta harus dapat dirasakan seluruh rakyat. **(Suparmoko 2006 : 5)**

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah tujuan yang ingin dicapai. Dalam rangka mewujudkan ini maka dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan melalui repelita dan pelaksanaan operasionalnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap tahunnya.

Disisi lain, pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban mensukseskan pembangunan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, setiap daerah harus mampu menggali segala sumber dana yang ada di daerahnya sendiri, yang berguna sebagai pembiayaan pembangunan daerahnya masing-masing, sehingga kegiatan pembangunan berjalan dengan baik dan lancar.

Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan tanpa terkecuali. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga Pendapatan Asli Daerah yang antara lain diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, serta membangun daerahnya sendiri dengan pemberian hak otonomi. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Siahaan 2005 : 14)**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kesiapan daerah dalam hal keuangan, baik dari sisi pengeluaran dan penerimaan daerah. Karena kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat

bervariasi, tergantung pada kondisi masing-masing daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah yang intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi maupun rendah. Hal ini berdampak pada besar tidaknya basis pajak di daerah-daerah yang bersangkutan. Di sisi lain, dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi publik setiap daerah juga sangat bervariasi, dimana saranaprasarana dan infrastruktur lainnya masih ada yang belum memadai.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur, yang juga kota terbesar ke-2 setelah Jakarta dan merupakan salah satu pusat dagang dan industri, maka harus dapat menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya yang sebagian harus dengan kekuatan sendiri. Untuk itu perlu adanya sumber-sumber pendapatan, dalam hal ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

Surabaya sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi masyarakat yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak, yaitu Pajak Hiburan.

Peningkatan penerimaan Pajak Hiburan dari tahun ke tahun diupayakan untuk dapat meningkat terus menerus. Pajak Hiburan sebagai salah satu Penerimaan Asli Daerah dan merupakan komponen dari pajak daerah ada di Surabaya, merupakan penerimaan daerah yang potensial, sehingga sangat relevan

sekali untuk selalu meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, Mengingat kebutuhan hiburan di kota Surabaya sangat besar sekali karena dengan adanya hiburan dapat mengurangi kepenatan yang selalu dirasa sebagian besar penduduk di Surabaya. Pemasukan pajak hiburan dilihat dari data Realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Surabaya yang dapat dilihat dari Badan Pusat Statistik Surabaya pada tahun 2002 sebesar Rp.7.711.516.000.00, pada tahun 2003 sebesar Rp.8.784.662.000.00 atau mengalami perkembangan sebesar 13,91 %, pada tahun 2004 penerimaan pajak hiburan naik menjadi Rp.10.540.421.843.00 atau mengalami perkembangan sebesar 19,98 %, kemudian pada tahun 2005 sebesar Rp.11.515.307.018.00 atau mengalami perkembangan sebesar 9,24 %. Dengan naiknya penerimaan pajak hiburan akan dapat menambah penerimaan daerah yang pada akhirnya dapat membiayai pembangunan daerah di Kota Surabaya. **(Anonim, 2005 : 423)**

Salah satu sumber dana yang diharapkan adalah dari sector retribusi parkir karena mempunyai potensi serta prospek yang cerah, karena melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat tidak tertutup kemungkinan untuk meningkatkan penerimaan retribusi dari sektor parkir.dengan ditingkatkannya pungutan tersebut diharapkan hasil yang diperoleh dari retribusi dalam pelaksanaan parkir, sistem pemungutannya mengacu pada peraturan daerah yang berlaku yaitu dengan memberikan tanda penerimaan berupa karcis. Dimana yang dimaksud disini, karcis parkir oleh petugas harus diletakkan atau ditempatkan pada kendaraan yang di parkir ada tempat yang mudah dilihat, dimana karcis tersebut berlaku untuk satu kali parkir.

Semakin banyaknya tempat parkir yang ada di Kota Surabaya saat ini tidak dikung oleh peningkatan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir, justru semakin memprihatinkan. Adapun penerimaan retribusi parkir pada tahun 2002 sebesar Rp. 6.398.176.000, pada tahun 2003 sebesar Rp. 6.404.181.000 atau mengalami perkembangan sebesar 9.38 %, tahun 2004 sebesar Rp. 6.603.156.500 atau mengalami perkembangan sebesar 3,10 %, kemudian pada tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.071.901.100 atau mengalami perkembangan sebesar 7,09 %. ( **Anonim, 2005 : 423** )

Pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut diperlukan adanya suatu penyusunan perencanaan yang sistematis, khususnya sumber-sumber keuangan daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara daerah. Sumber pendapatan daerah diartikan secara luas bukan saja penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat yang dalam praktek biasa bagi hasil pungut daerah atau subsidi langsung kepada daerah untuk keperluan tertentu, tetapi juga penerimaan yang berasal dari pemerintah itu sendiri atau pendapatan asli daerah sendiri. ( **Rimu, 1992 : 20** )

Perbandingan antara pajak hiburan dengan retribusi parkir adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan, hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.



2. Retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka salah satu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan kota Surabaya diusahakan bersumber dari pajak hiburan dan retribusi parkir yang perlu terus ditingkatkan.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih tentang pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Inflasi dan Jumlah Tempat Hiburan terhadap penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah yang diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Adakah pengaruh antara Pendapatan Perkapita, Tingkat Inflasi dan Jumlah Tempat Hiburan terhadap penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya ?
2. Manakah dari ketiga variabel yang paling dominan pengaruhnyaterhadap penerimaan Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Inflasi dan Jumlah Tempat Hiburan terhadap peningkatan penerimaan

Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya baik secara simultan maupun parsial.

2. Untuk mengetahui manakah dari ketiga variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap Pajak Hiburan dan Retribusi Parkir di Kota Surabaya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk digunakan :

1. Sebagai bahan informasi mengenai faktor-faktor yang menentukan penerimaan pajak hiburan dan retribusi parkir di kota Surabaya
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang mengadakan penelitian berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian yang akan datang.